

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan disertasi ini. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar doktor, setelah melalui rangkaian ujian proposal, seminar hasil penelitian (SHP), ujian tertutup (pra promosi), dan ujian terbuka (promosi).

Mengikuti pendidikan tinggi setingkat doktoral layaknya perjalanan panjang yang menantang, dan menuntut yang terbaik dari yang kita miliki. Semangat, komitmen, daya tahan, waktu, serta sumber daya lain yang berharga. Semua itu didedikasikan agar proses pendidikan ini bukan hanya menghasilkan gelar doktor, melainkan juga pengalaman bermakna, pemahaman yang makin mendalam, serta kebiasaan belajar yang semakin baik. Selama mengikuti pendidikan di Universitas Pelita Harapan, sejak permulaan hingga selesai, banyak pihak yang telah mendoakan, menyertai dan membantu. Penghargaan dan terima kasih yang tulus patut disampaikan kepada mereka, terutama kepada:

1. Bapak Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan (UPH), Jakarta, dan ketua sidang ujian terbuka.
2. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Di tengah kesibukan menjalankan tugas sebagai dekan dan ilmuwan, berkenan meluangkan waktu untuk menguji disertasi ini, sejak ujian proposal.
3. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., jauh sebelum memulai pendidikan doktor di UPH, penulis mengenal melalui karya-karya ilmiahnya, serta sering hadir di forum-forum akademik ketika beliau tampil sebagai narasumber. Alhamdulillah, beliau berkenan menjadi promotor dan menyertai penyusunan disertasi sejak awal. Dedikasi beliau sebagai ilmuwan akan menjadi teladan bagi penulis untuk menjalani profesi sebagai pengajar dan pembelajar.

4. Bapak *Associate* Prof. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Program Doktor Hukum, Universitas Pelita Harapan. Sebagai Ko-Promotor, beliau dengan penuh kesabaran dan ketelatenan memberikan masukan dan saran, sehingga arah disertasi ini menjadi jelas.
5. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., di tengah kesibukan beliau sebagai komisioner pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan guru besar di Universitas Pelita Harapan, selalu menyempatkan diri untuk menguji, meskipun sedang berada di luar kota.
6. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si., di tengah jadwal padat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, dan ilmuwan yang sibuk, selalu menyempatkan diri untuk menguji naskah disertasi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si. Empat hari menjelang ujian tertutup penulis diminta mencari seorang guru besar yang ahli tentang koperasi. Alhamdulillah, beliau bersedia menjadi penguji eksternal. Di tengah kesibukan beliau sebagai Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, serta guru besar di Universitas Pasundan, masih sempat meluangkan waktu untuk mengajar, menguji, dan membimbing. Kepedulian beliau terhadap koperasi, tercermin dari karya-karya ilmiahnya yang ditulis dalam bentuk buku dan jurnal ilmiah.
8. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., terima kasih yang tulus penulis ucapkan. Apresiasi beliau terhadap naskah disertasi ini sangat membesarkan hati. Pertanyaan substansial dalam tutur kata yang lembut, segera menyadarkan penulis, bahwa naskah disertasi ini tidaklah sempurna, ada banyak kekurangan dan kelemahan yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.
9. Kepada semua pihak yang telah ikut menyertai, menyemangati, dan mendoakan agar penulis segera menyelesaikan naskah disertasi ini. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati.
10. Kepada keluarga penulis, mimih, kakak, adik-adik, serta keponakan-keponakan. Semoga Allah SWT, selalu menyertai kalian dengan kasih sayang dan perlindungan. Aamiin.

Depok, 29 Oktober 2020

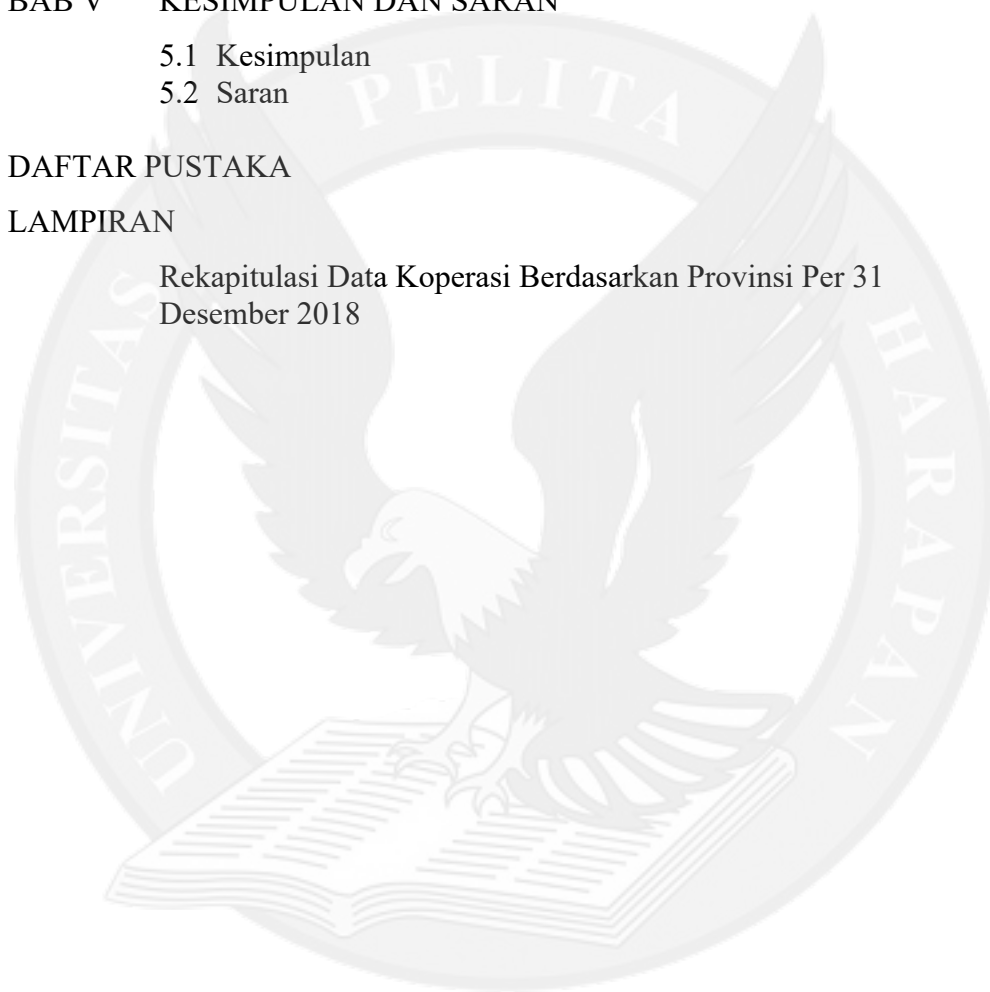
Sugeng

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	25
1.3 Tujuan Penelitian	26
1.4 Manfaat Penelitian	26
1.5 Orisinalitas Penelitian	27
1.6 Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	32
2.1.1 Teori Kewenangan dalam Negara Hukum	32
2.1.2 Teori Negara Kesejahteraan	54
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum	77
2.2 Sistem Ekonomi dan Ideologi Ekonomi Pancasila dalam UUD 1945	80
2.2.1 Sistem Ekonomi Kapitalisme	85
2.2.2 Sistem Ekonomi Sosialisme	96
2.2.3 Sistem Ekonomi Pancasila dan Landasan Konstitusional Demokrasi Ekonomi	107
2.3 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan dan Koperasi Simpan. Pinjam	130
2.4 Landasan Konsepsional	155
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	168
3.2 Prosedur Perolehan Bahan Penelitian	177
3.3 Sifat Analisis	178
3.3.1 Pendekatan	178
3.3.2 Analisis	183
3.4 Hambatan dan Penanggulangan	183
3.5 Jenis Data Penelitian dan Bahan Hukum	186
3.5.1 Studi Dokumen	186
3.5.2 Wawancara dan Analisis Data	188
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Perkembangan Koperasi dan Pengaturannya	192
4.1.1 Sejarah Gerakan Koperasi di Beberapa Negara	192

4.1.2	Sejarah Gerakan Koperasi dan Perkembangan Kebijakan dan Regulasi Koperasi di Indonesia	207
4.1.2.1	Kebijakan dan Regulasi Koperasi Pra Kemerdekaan	207
4.1.2.2	Kebijakan dan Regulasi Koperasi Pasca Kemerdekaan	212
4.1.3	Organisasi Koperasi Internasional	269
4.2	Kategori Koperasi dan Perangkat Organisasi Koperasi	272
4.2.1	Asas dan Prinsip Koperasi	272
4.2.2	Pengelompokan koperasi di Indonesia	278
4.2.3	Bentuk-Bentuk Koperasi	284
4.2.4	Perangkat Organisasi dan Manajemen Koperasi	288
4.2.5	Profil dan Kegiatan Usaha Beberapa Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia	293
4.2.5.1	Profil Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kodanua	293
4.2.5.2	Profil Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama	301
4.2.5.3	Profil Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kospin Jasa	311
4.2.6	Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pengaturannya	323
4.2.6.1	Jenis dan Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pengaturannya	323
4.2.6.2	Pengaturan Lembaga Keuangan Mikro	353
4.2.6.3	Profil Lembaga Keuangan Mikro	373
4.2.6.3.1	Bank Perkreditan Rakyat	376
4.2.6.3.2	Lembaga Keuangan Adat Lumbung Pitih Nagari	388
4.2.6.3.3	Lembaga Keuangan Adat Lembaga Perkreditan Desa	404
4.2.6.3.4	Lembaga keuangan Mikro Berbasis Daerah	417
4.2.7	Perbandingan antara Koperasi dengan Beberapa Lembaga Keuangan Mikro	422
4.2.7.1	Perbandingan antara Koperasi dan Badan Perkreditan Rakyat (BPR)	422
4.2.7.2	Perbandingan antara Koperasi dan Lumbung Pitih Nagari (LPN)	425
4.2.7.3	Perbandingan antara koperasi dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	426
4.2.8	Beberapa Kasus Penyalahgunaan Koperasi	429
4.2.8.1	Koperasi Simpan Pinjam Indosurya	430
4.2.8.2	Koperasi Hanson Mitra Mandiri	432
4.2.8.3	Pinjaman Daring (<i>Online</i>) Ilegal Berbadan Hukum Koperasi	435
4.2.9	Pengawasan Terhadap Koperasi	436

4.3	Pembaharuan Hukum Koperasi	439
4.3.1	Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	439
4.3.1.1	Pertimbangan Filosofis	439
4.3.1.2	Pertimbangan Sosiologis	442
4.3.1.3	Pertimbangan Yuridis	449
4.3.2	Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	463
4.3.3	Manajemen Risiko Koperasi	466
4.3.4	Lembaga Jaminan Simpanan Anggota Koperasi	471
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	474
5.2	Saran	477
DAFTAR PUSTAKA		480
LAMPIRAN		
	Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi Per 31 Desember 2018	



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	2
Grafik 2. Pergerakan Nilai Tukar Rupiah pada Saat Krisis Ekonomi, tahun 1997 – 1998	131
Grafik 3. Jumlah Bank Umum di Indonesia (1988 – 2019)	171
Grafik 4. Perkembangan Jumlah Aset dan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama	302

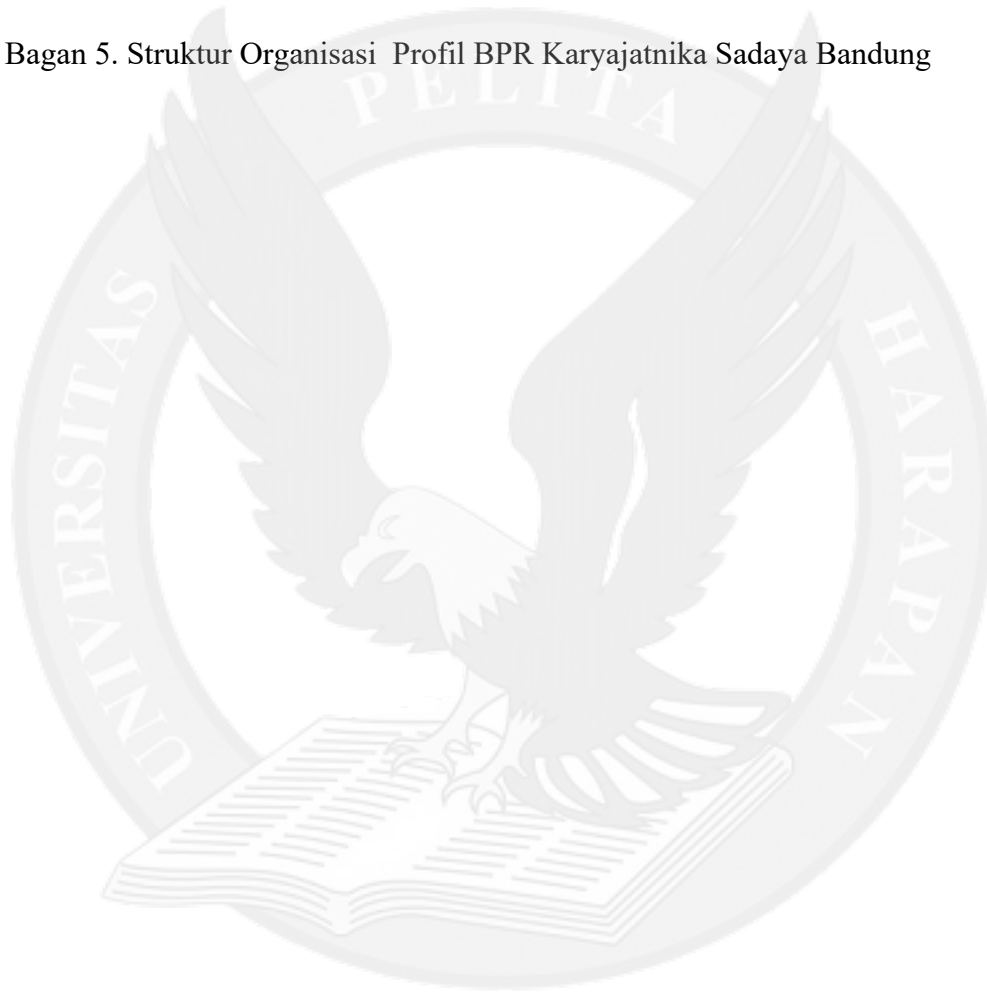


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skala dan Kriteria Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	11
Tabel 2. Hubungan Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Filsafat Pancasila	46
Tabel 3. Perbedaan Paradigma Ekonomi Liberalisme dan Demokrasi Ekonomi	126
Tabel 4. Aliran Koperasi Berdasarkan Peran dan Fungsi serta Hubungannya dengan Negara	277
Tabel 5. Sebaran Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu KSP Sukses Bersama	302
Tabel 6. Jadwal Pengambilan Dana Tabungan Pendidikan pada KSP. Sejahtera Bersama	308
Tabel 7. Profil dan Kegiatan Usaha Kospin Jasa	313
Tabel 8. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	323
Tabel 9. Rekapitulasi Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	369
Tabel 10. Perbandingan antara Koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	424
Tabel 11. Perbandingan antara Koperasi dan Lumbung Pitih Nagari (LPN)	425
Tabel 12. Perbandingan antara koperasi dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	428

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Proses Rapat Anggota Tahunan pada Kospin Jasa	260
Bagan 2. Susunan Organisasi KSP Kodanua	295
Bagan 3. Proses Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Kospin Jasa	317
Bagan 4. Proses Pembukaan Unit Bisnis Baru dan Layanan Baru pada Kospin Jasa	323
Bagan 5. Struktur Organisasi Profil BPR Karyajatnika Sadaya Bandung	384



DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
AFTA	: <i>ASEAN Free Trade Area</i>
AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
AVB	: <i>Algemene Volkscredietbank</i>
ACFSMC	: <i>All China Federation of Supply and Marketing Cooperatives</i>
AEC	: <i>ASEAN Economic Community</i>
ACO	: <i>ASEAN Cooperative Organization</i>
APII	: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
ADB	: Asian Development Bank
ATM	: <i>Automatic Teller Machine</i>
BKR	: Bank Kredit Rakyat
BMI	: Bank Muamalat Indonesia
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BKK	: Badan Kredit Kecamatan
Bappebti	: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
BKPD	: Bank Karya Produksi Desa
Bukopin	: Bank Umum Koperasi Indonesia
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPKN	: Badan Perlindungan Konsumen Nasional
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BI	: Bank Indonesia
BKK	: Badan Kredit Kecamatan
BKPD	: Bank Karya Produksi Desa
BKD	: Badan Kredit Desa
BKK	: Kredit Kecamatan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BI	: Bank Indonesia Timur
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BCA	: Bank Central Asia
BNI	: Bank Negara Indonesia
BUUD	: Badan Usaha Unit Desa
BMT	: <i>Baaitul Maal wat Tamwil</i>
BUSN	: Bank Umum Swasta Nasional
BEI	: Bursa Efek Indonesia
Bapenkop	: Badan Penggerak Koperasi
Balatkop	: Balai Latihan Koperasi
BIMAS	: Bimbingan Masyarakat
CRS	: <i>Cooperative Social Responsibility</i>
CII	: <i>Coody International Institute</i>

CCA	: <i>Canadian Cooperative Association</i>
CHS	: <i>Cenex Harvest States</i>
CV	: <i>Comanditer Venonscraft</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dekopinwil	: Dekopin Wilayah
Dekopinda	: Dekopin Daerah
D/O	: <i>Delivery Order</i>
DPRGR	: DPR Gotong Royong
DSN	: Dewan Syariah Nasional
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DEKOPIN	: Dewan Koperasi Indonesia
E-KYC	: <i>Electronic Know Your Customer</i>
FES	: Forum Ekonomi Syariah
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
GKBI	: Gabungan Koperasi Batik Indonesia
GNN	: Gerakan Nasional Nontunai
GCG	: <i>Guardian Capital Group</i>
GTZ	: <i>Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
Garuda	: Garba Rujukan Digital
GCMMF	: <i>Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation (GCMMF)</i>
HKI	: Hak atas Kekayaan Intelektual
IoT	: <i>Internet of Things</i>
Inkopad	: Induk Koperasi TNI Angkatan Darat
Inkopal	: Induk Koperasi Angkatan Laut
Inkopau	: Induk Koperasi Angkatan Udara
Inkoppol	: Induk Koperasi Kepolisian
IKPN	: Induk Koperasi Pegawai Negeri
Inkud	: Induk Koperasi Unit Desa
IKPI	: Induk Koperasi Perikanan Indonesia
Inkoveri	: Induk Koperasi Veteran Republik Indonesia
IKNB	: Industri Keuangan Non Bank
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IKD	: Inovasi Keuangan Digital
IJSD	: <i>Indonesia Journal Scientific Database</i>
ICA	: <i>The International Cooperation</i>
IMF	: <i>The International Monetary Fund</i>
JDIHN	: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
KURK	: Kredit Usaha Rakyat Kecil
Kominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KDI	: Koperasi Distribusi Indonesia
KUD	: Koperasi Unit Desa

KURK	: Kredit Usaha Rakyat Kecil
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KSP	: Koperasi Simpan Pinjam
KJA	: Koperasi Jasa Audit
Kosindo	: Koperasi Syariah Indonesia
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KSU	: Koperasi Serba Usaha
KPI	: Koperasi Pembiayaan Indonesia
Kospin	: Koperasi Simpan Pinjam
KSP	: Koperasi Simpan Pinjam
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LKNB	: Lembaga Keuangan Non-Bank
LPN	: <i>Lumbung Pitih Nagari</i>
LKMS	: Lembaga Keuangan Mikro Syariah
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LPN	: Lumbung Pitih Nagari
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan
LPD	: Lembaga Perkreditan Desa
LPK	: Lembaga Perkreditan Kecamatan
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LPKSM	: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPEP	: Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LKK	: Lembaga Jaminan Kredit Koperasi
LP3ES	: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
LJJK	: Lembaga Jaminan Kredit Koperasi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MA	: Mahkamah Agung (MA)
MLM	: <i>Multi Level Marketing</i>
MK	: Mahkamah Konstitusi
NACF	: <i>National Agricultural Cooperative Federation</i>
NTUC	: <i>The National Trade Union Congress</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
P2P	: <i>Peer to Peer Lending</i>
PT	: Perseroan Terbatas
PPKLP	: Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKLP)
PTUN	: Peradilan Tata Usaha Negara
PUSTEP	: Pusat Studi Ekonomi Pancasila
PDII	: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Perum PKK	: Perum Pengembangan Keuangan Koperasi
Puskud	: Pusat Koperasi Unit Desa
P3UK	: Pusat Pendidikan dan Pembinaan Usaha Kecil
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PIPU	: Pusat Informasi Pasar Uang
PDB	: Produk Domestik Bruto
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa

POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Puslapenkop	: Pusat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RAT	: Rapat Anggota Tahunan
RAK	: Rapat Anggota Khusus
RRC	: Republik Rakyat China
RJPMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RAT	: Rapat Anggota Tahunan
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RA	: Rapat Anggota
SMS	: <i>Short message service</i>
SGDs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
Simpedes	: Simpanan Perdesaan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SWI	: Satgas Waspada Investasi
SOM	: Standar Operasional Manajemen
SHU	: Sisa Hasil Usaha
SP3	: Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SKPP	: Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
SMC	: <i>Supply and Marketing Cooperative</i>
SNKI	: Strategi Nasional Keuangan Inklusif
SEKI	: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia
SWI	: Satgas Waspada Investasi
SOKRI	: Sentral Organisasi koperasi Rakyat Indonesia
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TRI	: Tebu Rakyat Intensifikasi
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UUD	: Undang-Undang Dasar
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
LPSM	: Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat
USP	: Unit Simpan Pinjam
USPPS	: Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS),
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
WEF	: <i>World Economic Forum</i>
WB	: <i>World Bank</i>
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia